

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, J. (2020). *Perihal Undang-Undang* (5th ed.). Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim, Trans.). Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Hart, H. L. A. (2017). *Konsep Hukum: The Concept Of Law* (Edisi cet. 1, cet. ke-7). Bandung: Indonesia Nusa Media.
- Munthe, G. E. (2024). *Antropologi & Sosiologi Hukum*. Purbalingga, Indonesia: Eureka Media Aksara.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). Bandung, Indonesia: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2019). *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung, Indonesia: Remadja Karya.
- Suratman. (2019). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Indonesia: PT. Refika Aditama.
- Wignjosoebroto, S. (2017). *Pergeseran Paradigma: Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum* (3rd ed.). Malang, Indonesia: Setara Press.
- Weber, M. (2020). *Kapitalisme, Birokrasi Dan Agama* (H. Hartono, Trans.). Yogyakarta, Indonesia: PT. Tiara Wacana.

Sumber Lain:

- Alaydrus Hadijah. (2019). *Stok Infrastruktur Indonesia Naik Jadi 43% Tahun Ini*. Jakarta: Bisnis.com.
- Giawa, A. A., & Nainggolan, O. (2025). *Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional*. BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting, 2(1), 316–326.
- Iswara, I. M. A. M. (2020). *Fungsionalitas Pengamanan Pembangunan Strategis Berbasis Digital Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Hukum Kejaksaan Negeri Cimahi, 198–213.

- Kartika, P. P., Subianto, A. D., & Iswara, I. M. A. M. (2019). *Politik Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo*. Jurnal Hukum Saraswati, 1(2), 263–279.
- La Haja, Sondakh, D. K. G., & Lengkong, N. L. (2020). *Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Dan Pendampingan Hukum Proyek Strategis Sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lex Et Societatis, 8(3), 116-127.
- LPPM Unpad. (2010). *LARAP: Upper Cisokan Pumped Storage*. Bandung: PT. PLN (Persero).
- Mahanani, A. E. E., Rosyida, F. N., Sabitha, K. S., & Shoofiya, S. I. (2021). *Peran Jaksa Intel Dalam Proses Pembangunan Strategis Khususnya Kegiatan Belanja Modal Jalan Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 2(2), 23–33.
- Makrun, M., Puluhulawa, F. U., & Toijow, L. M. (2020). *Mengagas Penguatan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengamanan Dan Pengawasan Pembangunan Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi*. Borneo Law Review, 4(2), 123–141.
- Mallombasi, M. Y. A. R. (2021). *Peran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dalam Pengawasan Dan Pengamanan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Pasal 819 Ayat 2 Nomor 006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pujiati. (2024). *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- PT. PLN Persero. (2021). *Ringkasan Eksekutif Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS) Hydropower Project 1040 MW*. Bandung: PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis.

Petunjuk Teknis Nomor:1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.